



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4687-4694

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dampak Program Jaring Pengaman Sosial terhadap Keberlanjutan Pendidikan Anak di Indonesia

Egix Dwi Prastya¹, Hadi Wijoyo², Dewi Kusuma Wardani³, Muhammad Sabandi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

¹egikdwprastya@student.uns.ac.id, ²hadi.wijoyo25@student.uns.ac.id,

³dewikusuma@staff.uns.ac.id, ⁴muhsabandi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menelaah dampak program jaring pengaman sosial (JPS), terutama Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP), terhadap keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada efektivitas program dalam meningkatkan partisipasi sekolah, menekan angka putus sekolah, serta memperkecil kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis berbasis pedoman PRISMA. Dari 88 artikel yang ditelusuri, diperoleh 22 studi relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPS secara signifikan membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan memperluas akses anak ke jenjang pendidikan menengah. Program ini terbukti meningkatkan keberlanjutan sekolah, meskipun efektivitasnya tidak sepenuhnya merata. Tantangan yang masih dihadapi mencakup kurangnya ketepatan sasaran penerima, nominal bantuan yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan, serta potensi ketergantungan jangka panjang. Faktor yang mendukung keberhasilan program antara lain kualitas pendampingan, sinergi antarinstansi, dan transparansi pengelolaan. JPS berperan penting dalam menjaga hak pendidikan anak, namun perlu penyempurnaan desain kebijakan serta evaluasi berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif disparitas wilayah, sehingga dapat menjadi dasar penguatan kebijakan sosial yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Sosial; Pendidikan Berkelanjutan; Ketimpangan Sosial; Kemiskinan; Pembangunan Sumber Daya Manusia; Perlindungan Sosial; Keadilan Pendidikan

1. Latar Belakang

Pendidikan dipandang sebagai hak mendasar yang dijamin secara global, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan serius dalam pemenuhannya di berbagai negara. UNESCO melaporkan bahwa sekitar 250 juta anak di dunia tidak memperoleh pendidikan formal, sementara 57% dari mereka belum menguasai keterampilan dasar. Angka tersebut bahkan meningkat hingga 70% pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Kondisi ini bukan hanya memengaruhi kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dunia yang ditaksir mencapai US\$10 triliun setiap tahunnya. Fakta tersebut menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi serta distribusi kesejahteraan yang tidak merata. Di Indonesia, ketimpangan yang sama terlihat jelas, di mana anak dari keluarga kaya memiliki peluang lebih besar melanjutkan pendidikan tinggi dibandingkan anak dari keluarga miskin. Ketidakseimbangan sosial-ekonomi tersebut menjadi hambatan besar bagi upaya pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, isu keberlanjutan pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari permasalahan ekonomi, struktur sosial, serta peran kebijakan negara dalam menciptakan akses pendidikan yang inklusif dan adil.

Faktor kemiskinan di Indonesia menjadi penyebab utama anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan, terutama pada jenjang menengah. Saputri (2021) menjelaskan bahwa biaya pendidikan tidak hanya mencakup pungutan resmi sekolah, tetapi juga kebutuhan pendukung seperti seragam, peralatan belajar, transportasi, hingga uang saku yang membebani keluarga miskin. Walaupun pemerintah telah menghapuskan biaya sekolah dasar dan menengah, penelitian Sulfiani et al. (2025) menemukan bahwa beban biaya di luar sekolah tetap menjadi kendala signifikan. Data Statistik Pendidikan 2024 juga mengungkap adanya kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Sebagai contoh, APM SMA/SMK di perkotaan mencapai 67,06%, sedangkan di pedesaan hanya 60,31%. Persentase anak tidak sekolah (ATS) usia 16–18 tahun di pedesaan tercatat 24,50%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 15,61%

di perkotaan. Fakta ini menunjukkan bahwa keterbatasan wilayah dan kondisi ekonomi semakin memperburuk kerentanan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Dengan demikian, permasalahan utama pendidikan di Indonesia bukan semata soal biaya, melainkan juga kesenjangan akses dan fasilitas antarwilayah yang belum merata.

Berbagai studi terdahulu menegaskan peranan penting program jaring pengaman sosial (JPS) dalam mendukung pendidikan anak di Indonesia. Holida et al. (2023) menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, memperbaiki kualitas kesehatan, serta meningkatkan partisipasi pendidikan anak. Vianti et al. (2023) juga menemukan bahwa PKH mampu memperbesar peluang anak dari keluarga rentan untuk tetap bersekolah, terutama di daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Penelitian Hakim (2020) mengindikasikan bahwa anak yang tidak menerima manfaat KIP atau PIP memiliki risiko 4,8 kali lebih besar untuk berhenti sekolah dibandingkan penerima program tersebut. Sementara itu, Mulyaningsih et al. (2022) menekankan bahwa beasiswa bagi mahasiswa berpenghasilan rendah secara signifikan meningkatkan capaian akademik mereka. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini memperlihatkan bagaimana bantuan sosial mampu memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Namun, hal ini juga menyiratkan perlunya jaminan keberlanjutan program agar manfaatnya tidak hanya bersifat sementara. Dengan kata lain, penelitian terdahulu memberi gambaran awal mengenai peranan kebijakan sosial dalam memperkuat keberlanjutan pendidikan.

Meskipun terdapat hasil positif dari implementasi JPS, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitasnya masih terbatas. Saputri (2021) menegaskan bahwa KIP belum sepenuhnya berhasil menekan angka putus sekolah secara signifikan. Nadila et al. (2025) mengidentifikasi bahwa sekitar 76% anak yang berhenti sekolah disebabkan faktor ekonomi, dengan rincian 67% karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan dan 8,7% karena harus bekerja membantu keluarga. Hasil penelitian Sulfiani et al. (2025) juga mengungkapkan adanya ketimpangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, baik dari segi fasilitas dasar maupun ketersediaan tenaga pendidik yang memadai. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa intervensi berbasis bantuan finansial saja belum cukup untuk memastikan keberlanjutan pendidikan. Sebagian besar program lebih menitikberatkan pada aspek aksesibilitas, namun belum sepenuhnya memperhatikan mutu layanan pendidikan yang diberikan. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana JPS mampu menjawab kompleksitas permasalahan pendidikan. Dengan demikian, celah penelitian terletak pada evaluasi efektivitas program dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi dan geografis.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh program jaring pengaman sosial terhadap keberlanjutan pendidikan anak di Indonesia. Fokus penelitian ditujukan pada program PKH, KIP, dan PIP sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan mengurangi angka putus sekolah. Analisis akan difokuskan pada sejauh mana ketiga program tersebut efektif mempertahankan anak dari keluarga miskin agar tetap bersekolah. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti variasi dampak di wilayah perkotaan dan pedesaan untuk menilai kesenjangan yang masih berlangsung. Tujuan lainnya adalah memahami peran program sosial dalam memastikan keberlanjutan pendidikan jangka panjang, bukan sekadar menjamin akses dasar. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai keterkaitan antara kebijakan sosial dan pendidikan berkelanjutan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi peningkatan efektivitas program sosial guna mendukung keberlangsungan pendidikan generasi muda.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur yang mengkaji hubungan antara kebijakan sosial, pendidikan, dan isu kemiskinan di Indonesia. Dengan menyertakan analisis empiris, penelitian ini berperan penting dalam memperluas kajian mengenai efektivitas intervensi sosial dalam mengatasi masalah putus sekolah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PKH, KIP, dan PIP agar lebih tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Ramadhan et al. (2025) yang menekankan pentingnya pemberian subsidi pendidikan, pemerataan sarana prasarana, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak. Dengan menitikberatkan pada aspek keberlanjutan, diharapkan penelitian ini dapat mendorong lahirnya generasi yang lebih cerdas, unggul, dan kompetitif di masa depan.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Tinjauan Pustaka Sistematis dengan mengacu pada *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Pedoman PRISMA memberikan standar pelaporan yang akurat, transparan, dan lengkap dalam penyusunan tinjauan sistematis Page et al. (2021). Pembaruan terbaru menunjukkan bahwa PRISMA sangat relevan untuk meningkatkan kejelasan, transparansi, dan reproduisibilitas dalam penelitian, khususnya yang melibatkan meta-analisis jaringan (Veroniki et al., 2025).

2.1. Diagram alir PRISMA

Penelitian ini menerapkan proses identifikasi, penyaringan, serta seleksi literatur yang relevan guna memastikan kualitas sumber. Dengan menggunakan kata kunci terkait jaring pengaman sosial dan keberlanjutan pendidikan anak, terkumpul 88 catatan awal dari basis data akademik. Pada tahap penyaringan pertama tidak ditemukan duplikasi maupun kendala teknis, sehingga seluruh catatan dapat diproses lebih lanjut. Evaluasi kelayakan kemudian dilakukan secara cermat, dengan menyesuaikan fokus artikel terhadap tujuan penelitian. Hasilnya, 33 laporan dikecualikan karena hanya membahas pendidikan anak, 10 laporan lebih menekankan kesinambungan pendidikan tanpa mengaitkannya dengan program sosial, serta 34 publikasi lain berfokus pada intervensi sosial tanpa membicarakan aspek pendidikan. Melalui seleksi ketat tersebut, diperoleh 22 studi yang memenuhi kriteria untuk ditinjau lebih lanjut. Alur seleksi divisualisasikan dengan diagram PRISMA.

2.2. Strategi pencarian

Penelitian ini berbasis tinjauan pustaka yang dilaksanakan melalui proses penelusuran sistematis pada platform basis data akademik pada tanggal 1 Juni 2024. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci “Jaring Pengaman Sosial” DAN “Pendidikan” DAN “Keberlanjutan” yang dipilih secara spesifik untuk memastikan keselarasan dengan fokus penelitian. Melalui pencarian awal tersebut, diperoleh sebanyak 88 artikel yang dianggap relevan dengan topik kajian. Setelah dilakukan proses pemeriksaan menyeluruh, tidak ditemukan adanya duplikasi data maupun artikel yang perlu dikeluarkan karena permasalahan teknis, sehingga keseluruhan data hasil pencarian awal tetap dipertahankan sebagai dasar untuk tahap seleksi selanjutnya. Tahap seleksi kemudian dilanjutkan dengan penilaian yang mencakup abstrak hingga isi penuh setiap artikel, guna menilai keterkaitannya dengan fokus penelitian, yakni hubungan antara keberadaan jaring pengaman sosial dan keberlanjutan pendidikan anak. Penilaian juga mencakup kelayakan metodologi, relevansi variabel yang digunakan, serta kontribusi ilmiah yang ditawarkan masing-masing penelitian. Melalui evaluasi yang ketat dan berlapis ini, hanya 22 artikel yang berhasil memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan. Artikel-artikel terpilih inilah yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kajian pustaka dan digunakan sebagai landasan konseptual sekaligus rujukan empiris dalam mendukung analisis penelitian ini.

2.3. Tabel

Tabel 1. Ringkasan Publikasi Terkait Penelitian

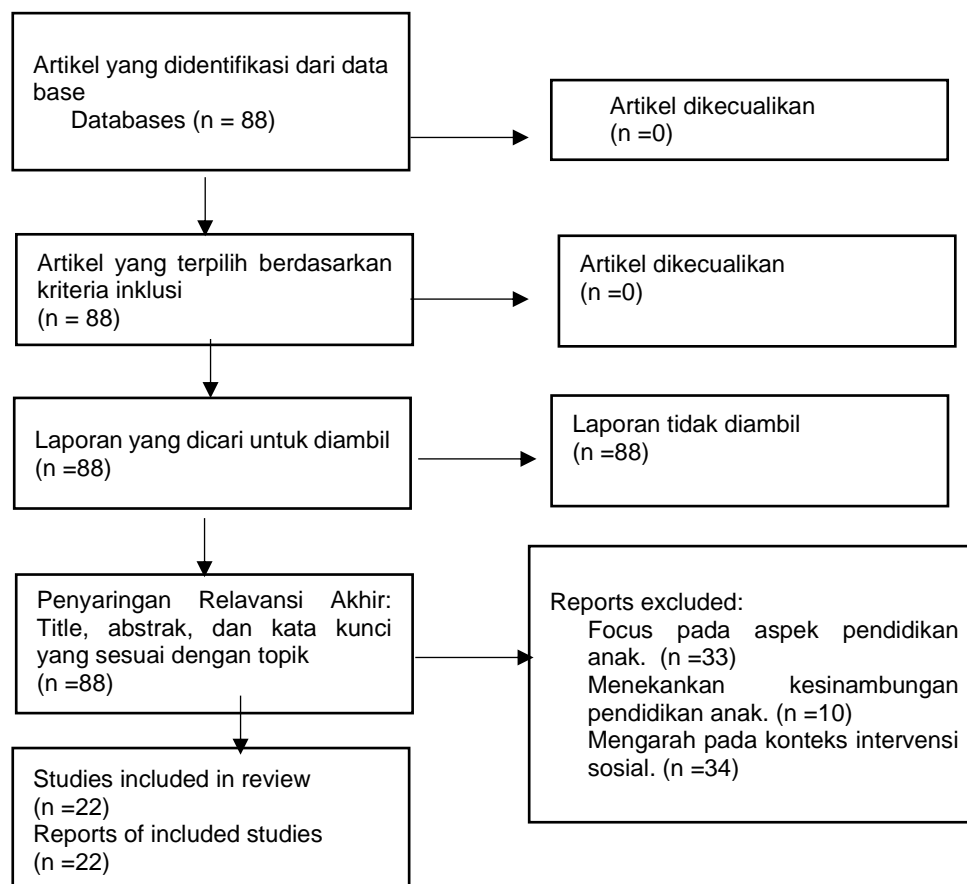
No	Penulis	Tahun Terbit	Jenis Publikasi	Lembaga Publikasi
1	Aditia and Széll	2025	Jurnal Internasional	★★★International Journal of Educational Research Open (Elsevier)
2	Ayunda pratini Tefa	2023	Journal Article	★★★Jurnal Penelitian dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi (PENSOS), Universitas Muhammadiyah Kupang
3	Gutama, Fedryansyah, and Nuriyah	2022	Journal Article	★★Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Universitas Padjadjaran
4	Heni Nur Seviani dkk.	2025	Journal Article	★★★Jurnal Media Akademik (JMA), PT. Media Akademik Publisher
5	Devi Irma.Vianti dkk	2023	Journal Article	★★★Jurnal Kebijakan Ekonomi, Universitas Indonesia
6	Arjuna Wicaksono, dkk	2023	Journal Article	★★★The Officium Nobile Journal, Universitas Sriwijaya
7	Irene Sondang Fitrinitia dkk.	2023	Jurnal Internasional	★★★Progress in Disaster Science (Elsevier)
8	Aprilliantoni dan Farhan Ali Jimale	2023	Journal Article	★★★Al Marhalah, Universitas Islam 45
9	Sofyan Sjaf dkk.	2025	Journal Article	★★★Wellbeing, Space and Society (Elsevier)
10	Utama Tonji dkk.	2023	Journal Article	★★★Journal Review Assignment, Universitas

11	Hasna, Setiawan, and Febriadi dkk.	2023	Jurnal Ilmiah	★★ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
12	Miriam Mutevere dkk.	2024	Jurnal Internasional	★★★★ Elsevier – Evaluation and Program Planning
13	Polyana Tenório de Freitas e Silva dkk.	2023	Jurnal Internasional	★★★★ Elsevier – International Journal of Educational Development
14	Trung Hoang dkk.	2023	Jurnal Internasional	★★★★ Elsevier – Economics of Education Review
15	Fitria Yunita Manggopa	2024	Jurnal Nasional	★★★ Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, Universitas Ichsan Gorontalo
16	Priska Adelia Putri dkk.	2025	Jurnal Nasional	★★★ Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Universitas Negeri Padang
17	Winny Wahyuni dkk.	2023	Jurnal Nasional	★★★ Politeknik STIA LAN Jakarta
18	Isbat Alvan Habibi	2025	Jurnal Nasional	★★ Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora, Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi
20	Adisty Dwayu Marchania dkk	2024	Jurnal Nasional	★★★ Publika: Universitas Negeri Surabaya
21	Gagan Suganda dkk	2022	Jurnal Nasional	★★★ Jurnal Sistem Informasi (UCIC, Cirebon)
22	Biantga dkk	2025	Jurnal Nasional	★★ Legal System Journal, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
23	Dedi dkk	2025	Jurnal Nasional	★★ DIRASAH, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Keterangan Relevansi:

- ★ : Rendah
- ★★ : Sedang
- ★★★ : Tinggi

2.4. Gambar



Gambar 1. Alur Pemilihan Artikel untuk Penelitian

2. Hasil dan Diskusi

Dampak Positif Program Jaring Pengaman Sosial

Kajian empiris menunjukkan bahwa kebijakan jaring pengaman sosial di Indonesia, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP/KIP), memiliki peran signifikan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Bantuan finansial yang disalurkan secara langsung terbukti efektif dalam mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga, sehingga angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan (Wahyuni et al. 2023). Sebagai contoh, PKH terbukti mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 6–15 tahun secara substansial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Syahwanes et al. (2025) yang menegaskan bahwa program tersebut dapat menekan angka putus sekolah dan berkontribusi pada pemutusan mata rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan adanya kebijakan ini, negara menegaskan perannya dalam menjamin hak pendidikan dasar bagi masyarakat miskin. Dari perspektif teori, kebijakan tersebut merepresentasikan bentuk investasi pada modal manusia yang berfokus pada pentingnya pendidikan sebagai landasan peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Oleh sebab itu, PKH tidak hanya sebatas perlindungan sosial, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Manfaat serupa terlihat dari implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang secara nyata memperluas kesempatan anak dari keluarga miskin untuk menempuh pendidikan hingga tingkat menengah. Gutama et al. (2022) menegaskan bahwa salah satu sasaran utama KIP adalah mengurangi angka putus sekolah, yang dibuktikan dengan peningkatan keberlanjutan pendidikan di berbagai daerah. Penelitian Seviani et al. (2025) bahkan melaporkan tidak ada siswa di SMA Negeri 13 Semarang yang mengalami putus sekolah, menandakan keberhasilan program ini dalam menjaga kesinambungan pendidikan. Dalam konteks nasional, Habibi (2025) juga menemukan bahwa keberadaan KIP meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu. Hal ini tercermin dari berkurangnya kesenjangan pendidikan, meningkatnya kepercayaan diri siswa, serta bertambahnya kesempatan untuk melanjutkan studi. Dengan demikian, KIP tidak sekadar dipahami sebagai mekanisme bantuan sosial, melainkan strategi penting dalam upaya pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia.

Selain menyasar anak sekolah, jaring pengaman sosial juga menjangkau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia, guna memastikan prinsip inklusivitas tetap terjaga. Wahyuni et al. (2023) menyebutkan bahwa PKH telah diperluas cakupannya hingga melibatkan individu dengan keterbatasan fisik agar tetap dapat mengakses layanan dasar. Muhammad et al. (2025) menyoroti peranan modal sosial yang membantu komunitas penyandang disabilitas netra memperoleh akses perlindungan sosial dengan lebih mudah. Kebijakan ini mencerminkan adanya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya pada aspek pendidikan inklusif. Lebih jauh lagi, program tersebut turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada dimensi pendidikan yang berkualitas untuk semua kalangan. Intervensi inklusif ini juga mampu menurunkan stigma yang selama ini melekat pada kelompok disabilitas, sehingga memperkuat nilai kesetaraan dalam masyarakat. Dengan demikian, jaring pengaman sosial tidak hanya berfungsi melindungi anak miskin dari risiko putus sekolah, tetapi juga memperkuat prinsip kesetaraan dan keberagaman dalam sistem pendidikan nasional.

Keterbatasan Program

Walaupun menunjukkan banyak manfaat, pelaksanaan program jaring pengaman sosial di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan pertama berkaitan dengan distribusi bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Penelitian Syahwanes dkk. (2025) mencatat tingkat kesalahan inklusi penerima mencapai 10–15% dan kesalahan eksklusi sekitar 20–25%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian keluarga miskin masih belum menerima haknya, sementara kelompok non-miskin justru memperoleh manfaat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Kiranti dan Situmorang (2025) yang menggarisbawahi bahwa banyak keluarga miskin belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Azhary (2025) juga menegaskan bahwa ketidaktepatan sasaran memperlemah efektivitas program secara keseluruhan. Dengan demikian, kelemahan dalam sistem pendataan dan mekanisme distribusi bantuan masih menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi agar tujuan program tercapai.

Keterbatasan kedua berkaitan dengan nominal bantuan yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan pendidikan, terutama di perkotaan. Marchania and Prabawati (2024) menemukan bahwa dana PKH tidak cukup untuk menanggung seluruh biaya pendidikan anak, terutama bagi mereka yang bersekolah di institusi swasta dengan biaya tinggi. Hal ini diperkuat oleh Seviani et al. (2025) yang menyatakan bahwa bantuan tahunan sebesar Rp1.800.000 memang bermanfaat, namun belum mampu menutup seluruh kebutuhan belajar siswa. Bahkan,

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersifat universal pun masih dianggap terbatas dan sederhana. Akibatnya, pihak sekolah kerap kali meminta tambahan dana dari orang tua untuk menutup kebutuhan operasional (Aditia & Széll, 2025; Candira dkk., 2025). Situasi ini membuat keluarga miskin tetap menghadapi hambatan dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait jumlah bantuan agar sesuai dengan realitas kebutuhan lapangan.

Keterbatasan lain yang patut dicermati adalah munculnya potensi ketergantungan penerima terhadap bantuan sosial yang diberikan secara rutin. Azhary (2025) mengidentifikasi bahwa sebagian penerima bantuan cenderung menjadi pasif dan kehilangan dorongan untuk mandiri secara ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa program pemberdayaan, bantuan sosial berisiko menumbuhkan ketergantungan jangka panjang. Wahyuni dkk. (2023) bahkan menegaskan bahwa hingga saat ini belum tersedia indikator yang jelas untuk mengukur tingkat kemandirian penerima manfaat. Prasetyanti (2024) menambahkan bahwa pemberdayaan ekonomi perlu menjadi fokus agar keluarga miskin tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Dengan demikian, tanpa strategi pemberdayaan yang terintegrasi, fungsi jaring pengaman sosial cenderung berhenti pada pemberian bantuan sementara, bukan perubahan struktural. Hal ini menegaskan pentingnya desain kebijakan yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga mendorong transformasi sosial.

Faktor Pendukung Efektivitas Program

Efektivitas kebijakan jaring pengaman sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pendampingan, kerja sama lintas sektor, serta transparansi dalam pengelolaan. Pendampingan intensif terbukti menjadi elemen utama dalam memastikan bahwa dana bantuan benar-benar digunakan sesuai tujuan. Suwarji dkk. (2025) menegaskan bahwa keberadaan pendamping PKH sangat penting untuk memastikan pemanfaatan dana terarah pada kebutuhan pendidikan anak. Sementara itu, Marchania dan Prabawati (2024) menambahkan bahwa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) tidak hanya berfungsi sebagai wadah pencairan bantuan, tetapi juga sebagai media edukasi terkait pengelolaan keuangan rumah tangga. Pendamping juga berperan menanamkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak, sehingga fungsi mereka tidak semata administratif, melainkan juga edukatif dan transformatif. Dengan demikian, keberadaan pendamping berkontribusi terhadap ketahanan keluarga dalam mengelola sumber daya pendidikan.

Selain pendampingan, sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat berperan penting dalam memperkuat efektivitas program. Mustika et al. (2023) menekankan bahwa penerapan pendidikan inklusif hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi multi-pihak. Ali dkk. (2025) menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil mampu menciptakan pendekatan yang lebih holistik. Melalui sinergi ini, ketersediaan sumber daya dapat dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan anak-anak miskin. Sekolah dapat memberikan dukungan akademik tambahan, masyarakat menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan pemerintah bertugas sebagai regulator sekaligus penyedia dana. Kolaborasi semacam ini bukan hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Prinsip ini juga selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kemitraan.

Aspek terakhir yang tidak kalah penting adalah transparansi distribusi bantuan serta keberlangsungan monitoring dan evaluasi. Rasya and Triadi (2024) menegaskan bahwa tata kelola bantuan sosial harus akuntabel dan mengikuti prinsip pemerintahan yang baik. Kiranti dan Situmorang (2025) menambahkan bahwa monitoring aktif memungkinkan pendamping merespons permasalahan secara cepat dan tepat. Sementara itu, Azhary (2025) menyoroti pentingnya pemantauan langsung melalui kunjungan rumah maupun pertemuan kelompok sebagai sarana evaluasi. Transparansi yang baik juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan dana serta memperkuat akuntabilitas di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan memperkuat prinsip good governance yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, aspek transparansi, evaluasi, dan monitoring berkesinambungan menjadi fondasi krusial untuk memastikan keberhasilan jaring pengaman sosial dalam jangka panjang.

3. Kesimpulan

Program jaring pengaman sosial seperti PKH, KIP, dan PIP terbukti berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin. Bantuan finansial mampu mengurangi beban ekonomi, meningkatkan angka partisipasi sekolah, dan menekan angka putus sekolah. Namun, efektivitas program masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketepatan sasaran, besaran bantuan yang terbatas, serta potensi ketergantungan penerima. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh pendampingan, sinergi lintas sektor, serta transparansi pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan penguatan strategi agar

program tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Referensi

1. Aditia, Reza, and Krisztián Széll. (2025). "Belonging Matters: How Context and Inequalities Shape Student Achievement in Indonesia." *International Journal of Educational Research Open* 9(August). doi:10.1016/j.ijedro.2025.100512.
2. Adnin Chiesa Syahwanes, Eli Apud Saepudin, Listia Ulya Madina, Shabna Azzahra, and Ima Muslimah. (2025). "Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Akses Layanan Sosial Bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1(2):176–83. doi:10.63822/j6s5v471.
3. Aprilliantoni, and Farhan Ali Jimale. (2024). "Menjaga Akses Pendidikan Yang Adil: Tantangan Dan Solusi Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia." *Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam* 7(2):166–74. doi:10.38153/almarhalah.v7i2.98.
4. Dea Mustika, Agnes Yurika Irsanti, Evi Setiyawati, Fretika Yunita, Nurhafizdah Fitri, and Putri Zulkarnaini. (2023). "Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak." *Student Scientific Creativity Journal* 1(4):41–50. doi:10.55606/ssc-j-amik.v1i4.1575.
5. Gagan Suganda, Marsani Asfi, Ridho Taufiq Subagio, and Ricky Perdana Kusuma. (2022). "Penentuan Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (Kip) Kuliah Menggunakan Naïve Bayes Classifier." *JSil (Jurnal Sistem Informasi)* 9(2):193–99. doi:10.30656/jsii.v9i2.4376.
6. Gutama, Arie Surya, Muhammad Fedryansyah, and Eva Nuriyah. (2022). "Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Sosial." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(3):389. doi:10.24198/jppm.v2i3.35872.
7. Habibi, Isbat Alvan. (2023). "Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP): Analisis Dampak Dan Tantangan Implementasi Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Sekolah." *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora* Volume 3(1):13–29. <https://ejournal.stai-alkifayahria.ac.id/index.php/alaman/article/view/231>.
8. Hakim, Abdul. (2020). "Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah." *Jurnal Pendidikan* 21(2):122–32. doi:10.33830/jp.v21i2.907.2020.
9. Hasna, Irza Setiawan, and Herry Febriadi. (2025). "Herry Febriadi | Efektivitas Program Indonesia." 1111. <https://ejournal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1182>.
10. Hoang, Trung X., and Ha Nguyen. (2023). "Multi-Generational Effects of School Access in a Developing Country: Evidence from a Mass Education Program in Vietnam." *Economics of Education Review* 97(October):102481. doi:10.1016/j.econedurev.2023.102481.
11. Lestari, and Retnayu Prasetyanti. (2024). "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) Di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 6(1):27–40.
12. Marchania, Adisty Dwayu, and Indah Prabawati. (2024). "Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Komponen Pendidikan Di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo." *Publika* 451–64. doi:10.26740/publika.v12n2.p451-464.
13. Muhammad Sakur, Rosyida Indah Mawarni, and Sedy Al Thariq Syah. (2025). "Mobilisasi Politik Berbasis Bantuan Sosial: Analisis Modal Sosial Komunitas Disabilitas Dalam Pemilihan Anggota DPD RI." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5(1):17. doi:10.53697/iso.v5i1.2505.
14. Mulyaningsih, Tri, Sarah Dong, Riyana Miranti, Anne Daly, and Yunastiti Purwaningsih. (2022). "Targeted Scholarship for Higher Education and Academic Performance: Evidence from Indonesia." *International Journal of Educational Development* 88(April 2021):102510. doi:10.1016/j.ijedudev.2021.102510.
15. Mutevere, Miriam, Thulani Runyararo Dzinamarira, Lorcadia Muzenda, Stephen Nyoka, Valentine Chokudinga, Tawanda Mugoniwa, Enos Moyo, Fortunate Kakumura, and Tafadzwa Dzinamarira. (2024). "Empowering Underprivileged Students beyond Financial Aid: Insights from a Scholarship Program's Monitoring and Evaluation." *Evaluation and Program Planning* 105(May):102448. doi:10.1016/j.evalprogplan.2024.102448.
16. Nurdiana Holida, Martina Eka Saputri, and Icha Cahya Kusuma Ningtias. (2023). "Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 1(2):136–58. doi:10.47861/tuturan.v1i2.171.
17. Page, Matthew J., Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, Larissa Shamseer, Jennifer M. Tetzlaff, Elie A. Akl, Sue E. Brennan, Roger Chou, Julie Glanville, Jeremy M. Grimshaw, Asbjørn Hróbjartsson, Manoj M. Lalu, Tianjing Li, Elizabeth W. Loder, Evan Mayo-Wilson, Steve McDonald, Luke A. McGuinness, Lesley A. Stewart, James Thomas, Andrea C. Tricco, Vivian A. Welch, Penny Whiting, and David Moher. (2021). "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews." *Bmj* 372. doi:10.1136/bmj.n71.
18. Ramadhan, Diky, Assita Azka Qatrunnada, Atika Aprilia, and Beny Dwi Lukitoaji. (2025). "Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Angka Kasus Anak Putus Sekolah Di Indonesia." *EDUCREATIVA : Jurnal Seputar Isu Dan Inovasi Pendidikan* 1(1):99–107.
19. Rasya, Harlin Sabrinda, and Irwan Triadi. (2024). "Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1(4):12. doi:10.47134/ijlj.v1i4.2330.
20. Saputri, Vikin Ade. (2021). "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Dalam Upaya Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Smp N 1 Poncowarno." *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 10(1):99–111. doi:10.21831/sakp.v10i1.17349.
21. Sd, Jenjang, D. A. N. Sma, D. I. Kota, Ayu Nadila, Monry Fraick, Nicky Gillian, and Melly Agustina Permatasari. (2025). "PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP ANGKA PUTUS SEKOLAH PADA." 13(3):234–47.
22. Seviani, H. N., R. R. Pamungkas, and ... (2025). "Evaluasi Program Indonesia Pintar (Pip) Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Kemendikbudristek Di Sma Negeri 13 Semarang." *Jurnal Media ...* 3(5). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1921%0Ahttps://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1921/1595>.
23. Silva, Polyana Tenório de Freitas e., and Luciano Menezes Bezerra Sampaio. (2023). "Does Student Aid Make a Degree More Likely? Evidence of the Permanence Scholarship Program from Survival Models." *International Journal of Educational Development* 96(October 2022). doi:10.1016/j.ijedudev.2022.102697.
24. Sjaf, Sofyan, Akmal Malik, Sampean, Abdurrahman Harits, Sayyid Al Bahr Maulana, Lukman Hakim, Ahmad Aulia Arsyad, Rajib Gandi, Zessy Arinal Barlan, Badar Muhammad, La Elson, and Fajar Cakrawinata. (2025). "Analysis of Spatial Inequality and Rural Development in the Supporting Region for Nusantara Capital City, Indonesia." *Wellbeing, Space and Society* 9(July):100286. doi:10.1016/j.wss.2025.100286.

25. Tefa, Ayunda Pratini. (2023). "Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan." *PENSOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi* 1(1):47–56. doi:10.59098/pensos.v1i1.937.
26. Vianti, Devi Irma, Magister Perencanaan, Kebijakan Pembangunan, and Fakultas Ekonomi. (2023). "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Bersyarat Program Keluarga Harapan Terhadap Partisipasi Pendidikan Anak Usia Sekolah Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 18(2). doi:10.7454/jke.v18i2.1135.
27. Wahyuni, Winny, Raden Dwiarto, Ronida S. Suwarno, and Bambang Giyanto. (2023). "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 5(2):11–22.
28. Wicaksono, Arjuna, Alwyn Aditya Prayoga, and Zikri Rahmat Putra. (2025). "Fasilitas Ekonomi, Sosial Dan Pendidikan Yang Berbeda Dan Menyebabkan Ketimpangan Kemampuan Generasi Muda Untuk Keluar Dari Garis Kemiskinan." *The Officium Nobile Journal* 2(1):1–9.